



Awasi Rumah Ibadah Jadi Lokasi Kampanye Lagi

Evaluasi Bawaslu Kota Jogja Berdasarkan Pemilu 2024

JOGJA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jogja mengungkap sejumlah kerawanan atau potensi pelanggaran selama tahapan Pilkada 2024. Pemetaan tersebut juga berdasarkan pengalaman Pemilu 2024 lalu. Ketua Bawaslu Kota Jogja Andie Kartala mengatakan,

potensi kerawanan dalam masa pemilihan kepala daerah bisa terjadi mulai dari masa pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Bahkan hingga penetapan hasil penghitungan suara. Sehingga perlu diantisipasi oleh penyelenggara pemilu. "Pemetaan kerawanan tersebut hasil identifikasi dan pemetaan kerawanan berbasis pada Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang telah diluncurkan 2022 lalu," ujar Andie dalam keterangannya, Minggu (30/6).

Andie membeberkan, pada tahap pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pernah menemukan pemilih yang memenuhi syarat namun tidak masuk DPT di Pemilu 2024. Kasus itu terjadi di lima kemantren. Yaitu Wirobrajan, Jetis, Gondokusuman, Gondomanan, dan Gedongtengen. Kemudian di tahapan kampanye, sempat ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu. Mulai dari penggunaan rumah ibadah untuk kampanye oleh

salah satu calon di Kemantren Wirobrajan. Bawaslu juga menemukan pelanggaran berupa intimidasi terhadap penyelenggara pemilu di Kemantren Wirobrajan dan Gondokusuman. Serta adanya laporan politik uang yang dilakukan oleh salah satu kampanye calon di kapanewon Kotagede. Andie melanjutkan, dalam tahap pemungutan suara juga cukup rawan terjadi pelanggaran. Sebab di Pemilu 2024 lalu ada kasus surat

suara tertukar di kelurahan Pandeyan, Kemantren Umbulharjo. Kemudian pernah ada komplain dari saksi di Kemantren Ngampilan, lantaran keberatan dengan hasil penghitungan suara. "Selain itu ada pemungutan suara ulang pada Pemilu 2024 yakni di Kemantren Wirobrajan dan Pakualaman," terang Andie. Dia pun mengungkap, kerawanan saat tahap penghitungan dan penetapan hasil penghitungan suara juga perlu diantisipasi. Contohnya,

pada Pemilu 2024 lalu ada penghitungan suara ulang karena terjadi selisih antara jumlah pemilih dengan jumlah surat suara. Serta di TPS Gedongkiwo terjadi gugatan salah satu calon legislatif atas hasil penghitungan suara. Selain itu, ada pula kerawanan berupa netralitas penyelenggara pemilu pada tahapan kampanye. Meski tidak masuk IKP, kasus tersebut pernah terjadi namun pada Pemilu 2024 di Kemantren Pakualaman. "Koordinasi aktif dengan seluruh stake-

holder terkait harus dilakukan dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran," uca Andie. Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja Noor Harsya Aryo Samudro menyampaikan, memang menaruh perhatian terhadap semua dimensi kerawanan. Sebab potensi kerawanan di Pilkada 2024 lebih beragam. "Baik itu dari kontestasi antar kandidat, proses rekapitulasi, hingga tingkat partisipasi pemilih," katanya. **(inu/pr/hep)**

	Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.		Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005